

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah kompetisi untuk mendapatkan posisi politik dalam pemerintahan melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu bisa berasal dari individu (independen) maupun partai politik, tetapi yang paling utama adalah mereka diusung oleh partai politik. Partai politik mengajukan calon-calon mereka untuk dipilih oleh masyarakat dalam pemilu.

Pemilihan umum memegang peranan penting karena beberapa alasan. Pertama, pemilu menjadi signifikan sebagai sarana demokrasi perwakilan. Ini merupakan cara paling efektif yang ditemukan untuk memberi rakyat kendali atas diri mereka sendiri. Berbagai masalah yang dihadapi rakyat mendorong mereka untuk lebih serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kedua, pemilu merupakan indikator utama bagi sebuah negara demokratis. Sebuah negara tidak bisa menganggap dirinya demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu, meskipun kenyataannya negara tersebut bersifat otoriter. Menurut pandangan Schumpertarian, demokrasi sebagai “metode politik” menjadi dominan dalam teori demokrasi, sehingga pemilu menjadi elemen kunci dalam mengukur demokrasi suatu negara. Ketiga, pemilu berfungsi sebagai alat untuk melemahkan dan mengakhiri rezim otoriter, seperti yang terlihat dari runtuhnya beberapa penguasa otoriter akibat pelaksanaan pemilu (Pamungkas, 2009).

Indonesia telah melaksanakan Pemilu 2024, sebuah perayaan demokrasi yang diadakan setiap lima tahun, yang meliputi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024. Berdasarkan prinsip dasar pemilu, pelaksanaan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, agar pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,

yaitu UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Generasi Z merupakan salah satu kelompok terbesar dalam populasi di Indonesia, dengan jumlah sekitar 74,93 juta orang atau 27,94% dari total populasi. Menurut Turner & Turner (2018), Generasi Z adalah generasi yang lahir di era digital, yang memungkinkan mereka memanfaatkan keterampilan ini untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, yang mencakup pemilih di dalam dan luar negeri, tersebar di 514 Kabupaten/Kota, 38 Provinsi, dan 128 negara. Dari total tersebut, 46,8 juta adalah pemilih dari Generasi Z, yang menunjukkan peran signifikan mereka dalam pelaksanaan dan hasil Pemilu 2024.

**Tabel 1.1 Tabulasi Jumlah Pemilih Pada Pemilu tahun 2024**

No.	Nama Generasi	Jumlah Pemilih
1.	Baby Boomer (1946-1964)	28.127.340
2.	Generasi X	57.486.48
3.	Generasi Y (Milenial)	66.822.389
4.	Generasi Z	46.800.161

*Sumber Data: Republika.co.id 2023*

Setiap kali pertarungan politik terjadi, munculnya politik identitas menunjukkan bahwa masyarakat masih belum mencerminkan sifat yang demokratis dan demokrasi yang terarah itu belum tercapai. Dengan keanekaragaman masyarakat Indonesia, adanya peran media sebagai aktor politik, pebisnis konsultan dan buzzer, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran bela negara, dan lemahnya penegakan hukum merupakan beberapa faktor pendorong adanya politik identitas (Wingarta, 2021).

Strategi politik identitas dan ujaran kebencian telah menjadi cara yang mudah dan murah untuk memenangkan kompetisi elektorat. Mencegah praktik ini tidaklah sederhana. Kunci utamanya adalah penegakkan hukum tanpa pertimbangan politik. Menghasilkan pemilu yang jujur tidak cukup hanya dengan himbauan moral, tetapi juga diperlukan koridor hukum yang jelas dan tegas untuk meminimalisasi dampak merusak terhadap sistem demokrasi.

Menurut Sukanto yang dikutip dalam Nasrudin, (2018) identitas dan agama adalah dua aspek yang selalu terkait dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah partai politik yang telah berpartisipasi dalam pemilu. Identitas dapat dibentuk secara parsial dan interaksial yang menghasilkan perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara keseluruhan. Komponen yang dapat merubah perubahan sosial ini adalah identitas etnis dan agama. Adanya politik identitas akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan sosial, begitu pula sebaliknya.

Praktik di lapangan mendapati peserta yang melakukan pemasaran politik tanpa menerapkan konsep pemasaran dengan benar, namun lebih memprioritaskan politik identitas untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Selain itu, politik identitas seringkali diterapkan secara berlebihan oleh para peserta pemilu, ujung-ujungnya memicu polarisasi di masyarakat. Kondisi ini menciptakan rasa eksklusivitas di kalangan kelompok berdasarkan etnis atau keyakinan tertentu.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dengan saudara ZO, seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. Beliau berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, para aktor politik secara aktif memanfaatkan isu politik identitas untuk menarik simpati masyarakat. Isu ini, terutama yang berkaitan dengan agama, sering kali diangkat dalam kampanye politik, yang terlihat jelas dari berbagai postingan di media sosial para

kandidat yang menonjolkan aspek keagamaan. Strategi ini dinilai efektif dalam meraih dukungan dari kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi atau nilai keagamaan yang sama.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudara E, seorang mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik, yang menyoroti bahwa dalam kontestasi pemilu tahun ini, isu agama sangat menonjol. Para politisi tidak hanya menggandeng ulama atau tokoh agama dalam setiap kegiatan kampanye mereka, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan tersebut selalu dipublikasikan melalui media sosial pribadi mereka. Hal ini menandakan adanya upaya sadar untuk memanfaatkan politik identitas, khususnya agama, sebagai salah satu strategi utama dalam meraih dukungan publik selama masa kampanye pemilu 2024.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pandangan generasi Z terhadap politik identitas pada pemilu tahun 2024, yang diangkat dalam karya ilmiah dengan judul **“Pandangan Generasi Z Terhadap Politik Identitas Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan generasi Z terhadap politik identitas calon presiden pada pemilu tahun 2024?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan generasi Z terhadap politik identitas calon presiden pada pemilu 2024 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Adanya praktik politik identitas pada pemilu tahun 2024 membuat penulis ingin fokus mengkaji pandangan generasi Z terhadap praktik politik identitas calon presiden pada pemilu tahun 2024.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan generasi Z terhadap politik identitas calon presiden pada pemilu 2024 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis di masa mendatang dan juga diharapkan dapat memperkaya kajian studi ilmu politik khususnya dan juga memperluas pengetahuan penulis khususnya terkait dengan praktik politik identitas terhadap generasi Z pada pemilu 2024.

##### **2. Manfaat Praktis**

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menjadi masukan terutama bagi penulis sendiri dan segenap mahasiswa ilmu politik dalam melihat pengaruh politik identitas dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa dalam melihat politik identitas pada pemilu tahun 2024.